

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap pembangunan selalu di dukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM), dimana manusia diposisikan sebagai sasaran pembangunan dan sebagai pelaksana dari pembangunan. Dalam melaksanakan pembangunan, manusia merupakan faktor yang berperan amat penting, karena tanpa adanya sumber daya manusia, pembangunan tidak dapat dilaksanakan. Untuk itu pembangunan memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas, potensial dan produktif sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai semaksimal mungkin.

Pendidikan adalah salah satu faktor yang mendapat perhatian dalam melaksanakan pembangunan. Karena asumsinya, dengan pendidikan Sumber Daya Manusia yang tercipta adalah Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Sehingga pembangunan yang dilakukan adalah pembangunan yang berkualitas. Selain itu, pendidikan bukan hanya sebagai faktor pendukung keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan, tetapi juga merupakan kebutuhan manusia dalam hal pembentukan manusia yang berkualitas

Pendidikan adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Namun, pada era globalisasi saat ini masih banyak anak di usia sekolah belum mendapatkan layanan pendidikan yang cukup baik. Dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 menyebutkan “Semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Pasal ini menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang sesuai tanpa memandang status sosial, usia, dan keadaan fisik. Hal ini sebagai upaya dalam pembangunan bangsa Indonesia, karena pendidikan adalah hal utama dalam pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul.

Sebagai generasi penerus bangsa, anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan usia dan kebutuhannya untuk dapat terus mengembangkan kemampuan fisik maupun psikisnya. Pendidikan merupakan kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Ahmadi (2013:98) masalah dasar dan

tujuan pendidikan adalah merupakan suatu masalah yang sangat fondamentil dalam pelaksanaan pendidikan. Sebab dari dasar pendidikan itu akan menentukan corak dan isi pendidikan. Dan dari tujuan pendidikan akan menentukan kearah mana anak didik akan dibawa. Masalah pendidikan merupakan masalah yang sangat penting dalam kehidupan. Bukan saja sangat penting, bahkan masalah pendidikan itu sama sekali tidak dipisahkan dari kehidupan. Baik dalam kehidupan keluarga, maupun dalam kehidupan bangsa dan negara. Maju mundurnya suatu bangsa sebagian besar ditentukan oleh maju-mundurnya pendidikan di negara itu.

Sistem pendidikan di Indonesia dibagi menjadi tiga jalur pendidikan, yaitu pendidikan informal, pendidikan formal, dan pendidikan non formal. pendidikan non formal. Sutarto (2007:3), pendidikan informal merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama, karena di dalam keluargalah setiap orang sejak pertama kali dan untuk seterusnya belajar memperoleh pengembangan pribadi, sikap dan tingkah laku, nilai-nilai dan pengalaman hidup, pengetahuan dan keterampilan melalui interaksi sosial yang berlangsung setiap hari di antara sesama anggota keluarga.

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pendidikan formal merupakan sistem pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga persekolahan yang dalam tindak operasionalnya memiliki legalitas dan formalitas serta beberapa persyaratan yang harus dipenuhi.

Pendidikan non formal adalah pendidikan yang diselenggarakan di luar jalur pendidikan persekolahan yang berorientasi pada pemberian layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Menurut pendapat Napitupulu dalam Sutarto (2007:12), pendidikan non formal hampir selalu berurusan dengan usaha bimbingan, pembinaan dan pengembangan warga masyarakat yang mengalami keterlantaran pendidikan, dari keadaan yang kurang tahu menjadi tahu, dari kurang terampil menjadi terampil, dari kurang

melihat ke masa depan menjadi seseorang yang memiliki sikap mental pembaharuan dan pengembangan.

Menurut Wan Chik Nurida Ismaila dan Norzaini Azmana, dalam jurnal *Diverse Learning Styles of Non Formal Adult Learners in Community Colleges in Malaysia*:

“Non formal education plays an important role in fulfilling the learning needs that formal education cannot provide. Most educators found that not everybody learn the same way. This is especially true for adult learners, due to differences of age and experiences. It is a more diverse group of learners than any other and they have multiple perspectives on learning. Due to this, adults have diverse learning styles. One may like reading, while another does best by trying out practical exercises. This diversity in learning has to be given attention to ensure that the learner needs are met. In addition, the information on learning styles is useful in developing an effective program”.

Pendidikan non formal yang memainkan peran penting dalam memenuhi pembelajaran yang tidak dapat diberikan oleh pendidikan formal. Kebanyakan pendidik mengemukakan bahwa tidak semua peserta didik harus belajar dengan cara yang sama seperti di sekolah formal. Hal ini terutama berlaku untuk pelajar dewasa, karena perbedaan usia dan pengalaman. Ini adalah kelompok yang lebih beragam dari peserta didik dari yang lain dan mereka memiliki beberapa perspektif pembelajaran. Karena ini, orang dewasa memiliki gaya beragam. Satu mungkin seperti membaca, sementara yang lain melakukan yang terbaik dengan mencoba latihan praktis. Keragaman dalam pembelajaran ini harus diberikan perhatian untuk memastikan bahwa kebutuhan peserta didik terpenuhi. Selain itu, informasi tentang gaya belajar berguna dalam mengembangkan program yang efektif.

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan lembaga pendidikan nonformal yang mulai berkembang di Indonesia sejak akhir tahun 1990-an. Gagasan pendirian PKBM muncul sebagai respons terhadap kebutuhan pendidikan yang inklusif, fleksibel, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, terutama bagi kelompok yang tidak terjangkau oleh sistem pendidikan formal, seperti anak putus sekolah, masyarakat marginal, perempuan, dan kelompok rentan lainnya.

Perkembangan PKBM di Indonesia secara resmi mulai diakui setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya dalam Pasal 26 yang memberikan legalitas dan ruang pengembangan bagi pendidikan nonformal. Dalam beleid ini disebutkan bahwa pendidikan nonformal memiliki fungsi pelengkap, penambah, dan/atau pengganti pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. PKBM menjadi salah satu bentuk satuan pendidikan nonformal yang diakui dan difasilitasi oleh pemerintah.

Dalam perjalanannya, PKBM berkembang secara pesat baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Berdasarkan data dari Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus (Dikmas dan Diksus) Kemendikbudristek, saat ini terdapat ribuan PKBM yang tersebar di seluruh Indonesia, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Fungsi PKBM semakin meluas, tidak hanya menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan (Paket A, B, dan C), tetapi juga program-program pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan keterampilan, kewirausahaan, literasi digital, pendidikan kecakapan hidup (life skills), dan pendidikan keluarga.

Perkembangan PKBM juga didorong oleh berbagai regulasi pendukung, seperti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal dan Permendikbudristek Nomor 73 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Pendidikan Nonformal, yang mengatur standar minimal kelembagaan, kurikulum, tenaga pendidik, dan sarana prasarana PKBM. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat fungsi PKBM sebagai agen transformasi sosial melalui jalur pendidikan nonformal.

Namun demikian, dalam praktiknya, perkembangan PKBM masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan anggaran operasional, kualitas SDM tutor yang belum merata, serta minimnya dukungan dari pemerintah daerah. Meski demikian, dengan semangat kemandirian dan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan swasta, PKBM tetap menjadi tumpuan harapan bagi banyak warga negara dalam memperoleh hak pendidikan secara adil dan

merata.

Selain sebagai lembaga pendidikan, PKBM juga telah bertransformasi menjadi pusat inovasi komunitas yang menjembatani antara pendidikan dan dunia usaha. Beberapa PKBM bahkan telah berhasil mencetak wirausahawan baru dari kalangan masyarakat desa melalui pelatihan-pelatihan keterampilan berbasis potensi lokal. Secara keseluruhan, PKBM berkembang dari lembaga alternatif menjadi lembaga strategis dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia, sejalan dengan visi pendidikan nasional yang menekankan pentingnya pembelajaran sepanjang hayat (*lifelong learning*) dan pendidikan berbasis masyarakat.

Pendidikan nonformal dalam implementasi program-programnya memiliki model satuan manajemen kelembagaan yang bervariasi. Model-model satuan yang dibangun sangat tergantung pada kebutuhan program, sasaran didik dan kepentingan pengembangan program. Besar kecilnya model satuan manajemen kelembagaan serta luasnya sasaran yang dikembangkan sangat ditentukan oleh kemampuan pengembang (*provider*) dalam memahami jenis-jenis program yang akan dibangun. Beberapa model satuan manajemen kelembagaan yang sudah sejak lama ada dalam konsep pendidikan nonformal yang asali (*indigenous*) diantaranya adalah pesantren. Meskipun sudah banyak pada era sekarang, pesantren yang menyatu dengan pendidikan formal. Model manajemen lembaga lainnya diantaranya adalah kelompok belajar, majelis taklim, lembaga kursus, lembaga pelatihan dan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM).

Pusat kegiatan belajar masyarakat atau dikenal dengan sebutan PKBM, merupakan sebuah lembaga yang lahir dari pemikiran tentang kesadaran pentingnya kedudukan masyarakat dalam proses pengembangan pendidikan nonformal. Oleh karena itu berdirinya PKBM ditengah-tengah masyarakat diharapkan mampu menjadi tulang punggung bagi terjadinya proses pembangunan pendidikan melalui pemberdayaan potensi-potensi yang ada di masyarakat. Sihombing (2009: 22) menyatakan bahwa:

PKBM merupakan salah satu alternatif yang dapat dipilih dan dijadikan ajang pemberdayaan masyarakat. Hal ini selaras dengan pemikiran bahwa dengan melembagakan PKBM, akan banyak potensi yang selama ini tidak tergali akan dapat digali, ditumbuhkembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan melalui pendekatan-pendekatan budaya persuasif.

PKBM sebagai salah satu mitra pemerintah dalam upaya mencerdaskan kehidupan masyarakat (bangsa) melalui program-program pendidikan nonformal, diharapkan mampu menumbuhkan masyarakat belajar (*learning society*) sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kemandirian, keberdayadidikan, dan inovatif dalam mencari berbagai informasi baru dalam rangka meningkatkan kehidupannya. Sebagai pusat pembelajaran (*learning centre*), PKBM dibangun atas dasar kebutuhan masyarakat itu sendiri, terutama berkaitan dengan pentingnya kemampuan pengetahuan, keterampilan atau kecerdasan anggota masyarakat. Ketika pendidikan nonformal dijadikan sebuah strategi dalam pengembangan pendidikan dan pembangunan masyarakat, PKBM tampil sebagai salah satu wadah dalam mewujudkan program-program pendidikan dan keterampilan yang terpadu dengan kehidupan dan kebutuhan masyarakat, baik program pendidikan nonformal yang digulirkan pemerintah maupun yang diprakarsai masyarakat.

Perkembangan PKBM di Indonesia dewasa ini terus meningkat apalagi setelah terjadinya krisis ekonomi yang melanda kawasan Negara-negara Asia Tenggara sekitar pertengahan Tahun 1990 an. Pada Tahun 1998 perkembangan PKBM semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya kebutuhan layanan pendidikan masyarakat melalui pendidikan nonformal, juga dipicu oleh berbagai persoalan dibidang pendidikan dan ekonomi khususnya dalam pendidikan nonformal. Persoalan-persoalan tersebut meliputi: (1) meningkatnya masyarakat rawan daya beli; (2) meningkatnya jumlah penduduk miskin; (3) tingginya angka buta huruf (akasara latin); (4) realisasi wajib belajar 9 tahun melalui pendidikan nonformal; (5) tingginya angka putus sekolah (*dop out*) siswa SD, SMP, SMA dan yang sederajat; (6) tingginya siswa tidak melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi, dan; (6) kebutuhan pendidikan keterampilan hidup (*lifeskill education*), banyak kebutuhan orang yang tidak terlayani melui pendidikan formal.

Meningkatnya kebutuhan akan layanan pendidikan nonformal di tengah-tengah masyarakat, terdapat komponen masyarakat merasa tergugah untuk ikut berpartisipasi dalam mendirikan PKBM. Oleh karena itu, PKBM saat ini dikembangkan oleh berbagai pihak baik oleh masyarakat, lembaga (organisasi) sosial kemasyarakatan, keagamaan, maupun dibentuk oleh pemerintah khususnya Dinas Pendidikan kabupaten/kota, kecamatan melalui Penilik Pendidikan Masyarakat, bahkan sampai di tingkat desa/kelurahan. Persoalan-persoalan yang melingkupi di dalamnya terus terjadi, hal ini diakibatkan oleh banyaknya PKBM yang didirikan bukan atas dasar kebutuhan masyarakat akan, akan tetapi dibangun atas dasar kepentingan menyerap program pemerintah semata. Disamping itu PKBM belum benar-benar memainkan peranan sebagai fasilitator yang melakukan pemberdayaan (*empowerment*) terhadap masyarakat, bahkan masih banyak ditemukan PKBM yang dibentuk secara rekayasa untuk mendorong masyarakat agar mendirikan PKBM.

Sejumlah PKBM tersebut di atas, memiliki variasi dalam manajemennya maupun jenis dan jumlah program yang diselenggarakan, sedang dalam proses manajemen program memiliki cara/metode yang berbeda-beda pula. Perbedaan tersebut mewarnai tiap-tiap PKBM untuk mengembangkan potensi-potensi baik yang ada di masyarakat maupun dari mitra-mitra kerjanya.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa: “Pendidikan Non Formal, diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.” Pendidikan non formal mendapatkan porsi yang besar dalam menyelenggarakan proses pendidikan karena kedudukannya sebagai salah satu jalur pendidikan yang ada di Indonesia. Komar (2006:205) menyatakan bahwa sifat penyelenggaraan kegiatan pendidikan pada jalur pendidikan non formal berbeda dengan jalur pendidikan sekolah. Ciri utama yang membedakannya adalah keluwesan penyelenggaraan pendidikan yang berkenaan dengan waktu dan lama belajar, usia peserta didik, isi pelajaran, cara penyelenggaraan pengajaran dan penilaian hasil belajar. Pendidikan non

formal memiliki waktu yang lebih fleksibel jika dibandingkan dengan jalur pendidikan formal, waktunya dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Usia peserta didik juga tidak memiliki batasan yang khusus, usia peserta didik saat mengikuti sistem pendidikan bervariasi dari yang muda sampai yang tua. Isi pelajaran lebih banyak menggunakan praktik daripada hanya teori yang dilaksanakan di dalam kelas saja.

Pendidikan non formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Pendidikan non formal sebagai sebuah bagian dari sistem pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam rangka pengembangan dan implementasi belajar sepanjang hayat (*longlife education*). Pendidikan non formal merupakan sebuah layanan pendidikan yang tidak dibatasi oleh waktu, usia, jenis kelamin, ras (suku, keturunan), kondisi sosial budaya, ekonomi, agama, dan lain-lain.

Menurut pendapat Marzuki (2012:141), tugas pendidikan non formal adalah: (1) sebagai persiapan memasuki dunia sekolah; (2) sebagai suplemen atau tambahan pelajaran karena mata pelajaran yang disajikan di sekolah terbatas; (3) sebagai komplemen atau pelengkap karena kecakapan tertentu memang tidak diajarkan di sekolah tetapi dipandang perlu, sementara kurikulum di sekolah tidak mampu menampungnya, dan; (4) sebagai pengganti (substitusi) karena anak-anak yang tidak pernah sekolah harus memperoleh kecakapan sama atau setara dengan sekolah.

Sudjana (2008:4) menyatakan pendidikan non formal adalah kegiatan yang sistematis yaitu kegiatan yang memiliki komponen, proses, dan tujuan program. Komponen-komponen program pendidikan non formal terdiri atas masukan lingkungan (*environmental input*), masukan sarana (*instrumental input*), masukan mentah (*raw input*), dan masukan lain (*other input*). Lingkup pendidikan non formal meliputi *pertama*, pendidikan anak usia dini yang dilakukan melalui kelompok bermain dan taman penitipan anak. *Kedua*,

pendidikan keaksaraan yang merupakan garapan utama program keaksaraan fungsional. *Ketiga*, pendidikan kesetaraan yang dilakukan melalui program Paket A setara SD, Paket B setara SMP, Paket C setara SMA. *Keempat*, pendidikan kecakapan hidup yang menjadi bidang garapan program kelompok belajar usaha (KBU), kursus-kursus, pelatihan keterampilan, magang, sanggar, padepokan, dan sebagainya. *Kelima*, pendidikan kepemudaan. *Keenam*, pendidikan atau pemberdayaan perempuan. *Ketujuh*, pendidikan orang lanjut usia.

Program kesetaraan sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan wajib belajar pendidikan dasar, disamping dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidikan dan untuk menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pelayanan pendidikan bagi semua anggota masyarakat. Satuan pendidikan non formal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Satuan pendidikan non formal terdiri dari lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taqlim, serta satuan pendidikan sejenis. PKBM adalah satuan pendidikan non formal yang diselenggarakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan belajar masyarakat yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat setempat sesuai dengan potensi ekonomi, sosial dan budaya lingkungan alamnya. Program utama PKBM adalah program pendidikan non formal antara lain pendidikan kesetaraan, Pendidikan Keaksaraan, PAUD, dan Program Kursus atau Pelatihan terstruktur.

Dalam proses pemberdayaan masyarakat tersebut, PKBM bukan hanya melaksanakan pembelajaran saja tetapi juga bisa didukung dengan kegiatan lain seperti pelatihan. Pelatihan ini diberikan untuk para peserta didik untuk dapat meningkatkan kompetensi yang akhirnya digunakan dalam kehidupan praktis di masyarakat. Pelatihan ini tentunya menjadi bekal yang bermanfaat bagi peserta didik sehingga dapat mengembangkan dirinya sendiri.

Oleh karenanya kerjasama dan kemitraan yang sinergis dan terbuka dengan pihak-pihak tertentu atau masyarakat (tokoh masyarakat) yang potensial dapat dilibatkan dalam pengembangan dan pengendalian program termasuk

dengan pemerintah, pihak swasta, dan sponsor lainnya. Hal ini merupakan strategi dasar yang dapat dikembangkan dalam manajemen sumber daya agar efektif dan efisien. Dengan demikian manajemen PKBM perlu difasilitasi dalam berbagai program kegiatan.

Penekanan kebijakan pada PNFI dalam manajemen PKBM sesungguhnya dilandasi oleh dua alasan pokok, yaitu : *Pertama*, mengatasi kelemahan pendidikan sekolah (pendidikan formal), di mana pendidikan formal dinilai tidak cukup memenuhi pemenuhan peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan serta keterampilan. *Kedua*, terjadinya kecenderungan global yang menuntut dilakukannya peningkatan SDM yang dilakukan secara cepat dan efektif. Upaya ini hanya mungkin dilakukan apabila masyarakat yang masih buta huruf dituntaskan programnya dan pendidikan berkelanjutan terus diupayakan," teranginya. Terkait upaya peningkatan kualitas SDM melalui PNFI yang diimplentasikan pada PKBM terutama dalam program kelompok belajar Paket C , terdapat beberapa konsep penyelenggaraan PNFI yang memiliki keterkaitan dengan ruang lingkup, karakteristik, fungsi, asas, jenis serta kedudukan dari PNFI itu sendiri.

Coombs dan Manzoor A. (2005) dalam bukunya *“he World Crisis In Education* mengungkapkan:

Pendidikan itu pada dasarnya dibagi menjadi tiga jenis, yakni Pendidikan Formal (PF), Pendidikan Non Formal (PNF) dan Pendidikan In Formal (PIF). Khusus untuk PNF, Coombs menggambarkan sebagai sebuah kegiatan yang diorganisasikan diluar sistem persekolahan yang mapan, apakah dilakukan secara terpisah atau bagian terpenting dari kegiatan yang lebih luas dilakukan secara sengaja untuk melayani anak didik tertentu untuk mencapai tujuan belajarnya.

Purwanti (2019: 10) juga mengemukakan bahwa:

Salah satu bentuk Pendidikan Nonformal adalah Kelompok Belajar Paket C (Kejar Paket C). Program Kelompok Belajar Paket C adalah program pendidikan pada jalur non formal yang ditujukan bagi warga masyarakat yang karena keterbatasan social, ekonomi, waktu, kesempatan dan geografis tidak dapat mengikuti Pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat, dan lulusan program Kejar Paket C berhak mendapat ijazah setara SMA.

Oleh karena itu Napitupulu (2005: 22) mengemukakan: “Kelompok belajar adalah program pendidikan luar sekolah yang sifat dan bentuknya mengejar ketinggalan, bekerja sambil belajar atau sebaliknya dan wadah sebagai kelompok belajar” Judul penelitian mengenai peran PKBM dalam pelatihan untuk meningkatkan kewirausahaan Peserta didik (Studi Kasus di PKBM Bina Bangsa Berkarakter dan PKBM Cahaya Kahuripan Bangsa) Menarik perhatian peneliti karena mengupas peran krusial Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam membekali generasi muda dengan jiwa wirausaha. Di tengah lanskap ekonomi yang dinamis dan penuh tantangan, penelitian ini menjadi relevan untuk menggali strategi PKBM dalam menumbuhkan mentalitas berwirausaha pada peserta didiknya..

Pendidikan kewirausahaan, menyangkut aspek sumber daya manusia, kurikulum, sarana prasarana, kesiswaan dan hubungan masyarakat. Oleh sebab itu perlu didukung oleh pendidik dan tenaga kependidikan yang kreatif, inovatif, dan berjiwa wirausaha, serta manajemen yang dapat menggerakkan segala sumber daya yang dimiliki. Hal ini juga berperan menjembatani agar proses dan *output* pembelajaran kewirausahaan memiliki relevansi yang tinggi dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Grand teori dari penelitian ini adalah teori Motivasi Kewirausahaan (*Entrepreneurial Motivation Theory*) Venesaar et al. (2006:104) menjelaskan bahwa motivasi seseorang menjadi wirausaha dibagi dalam tiga dimensi, yaitu *Ambition for freedom* (Ambisi kemandirian), *Self-realisation* (Realisasi diri), *Pushing factors* (Faktor pendorong). Dimensi *ambition for freedom* (Ambisi kemandirian) dengan indikator aktivitas lebih bebas, memiliki usaha sendiri, menjadi lebih dihormati, terdepan dalam menerapkan ide baru dan mengembangkan hobi dalam bisnis. Dimensi *Self-realisation* (Realisasi diri) memiliki indikator memperoleh posisi yang lebih baik di masyarakat, merasakan tantangan, memotivasi dan memimpin orang lain, melanjutkan tradisi keluarga, mengimplementasikan ide atau berinovasi dan mengikuti orang lain. Dimensi terakhir yaitu *Pushing factors* (Faktor pendorong) dengan indikator kehilangan

pekerjaan, memperoleh pendapatan yang lebih baik dan tidak puas dengan pekerjaan.

Teori ini berfokus pada faktor-faktor yang memotivasi individu untuk terlibat dalam aktivitas kewirausahaan, seperti kebutuhan akan pencapaian, otonomi, dan pengakuan sosial. Motivasi Berusaha dapat didefinisikan melatarbelakangi dan mendorong seseorang melaksanakan berbagai aktivitas dan menjadi energi pada pencapaian kebutuhan, memberi rasa kepuasan ataupun dapat mengurangi timbulnya ketidakseimbangan dengan membuka suatu bisnis (Zimmerer dalam Budiati, 2012:91). McClelland (dalam Hastuti, 2012:14) menjelaskan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan wirausahawan adalah didorong oleh kebutuhan akan prestasi, terhubung dengan banyak orang dan mendapatkan kekuasaan baik secara finansial maupun sosial.

Gap antara dimensi Teori Motivasi Kewirausahaan dan kondisi di lapangan pada PKBM Bina Bangsa Berkarakter dan PKBM Cahaya Kahuripan Bangsa berdasarkan masing-masing dimensi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dimensi *Ambition for Freedom* (Ambisi Kemandirian) mengacu pada keinginan individu untuk memiliki kebebasan dalam bekerja, termasuk kebebasan dalam mengambil keputusan dan mengatur waktu. Saat ini peserta didik pada kedua PKBM tersebut masih merasa terikat dengan keterbatasan sumber daya atau kurangnya dukungan eksternal meskipun memiliki keterampilan dasar.
2. Dimensi *Self-Realisation* (Realisasi Diri) berkaitan dengan keinginan individu untuk mencapai potensi penuh mereka dan merasa puas dengan apa yang mereka lakukan. Meskipun pelatihan pada kedua PKBM tersebut memberikan keterampilan praktis, namun kurangnya dukungan emosional atau mentor yang berpengalaman akan menghambat realisasi diri peserta didik.
3. *Pushing Factors* (Faktor Pendorong) mencakup berbagai faktor eksternal yang mendorong seseorang untuk menjadi wirausaha, seperti kebutuhan finansial, kondisi pasar, dan dukungan keluarga. Motivasi yang kuat untuk memulai usaha dihadapkan hambatan seperti akses ke modal, pasar, dan

jaringan masih menjadi kendala besar bagi peserta didik pada kedua PKBM tersebut.

Middle theory atau teori menengah adalah konsep teoritis yang berada di antara *grand theory* dan teori tingkat mikro. *Middle theory* lebih fokus pada aspek spesifik dari fenomena tertentu, memberikan kerangka kerja yang lebih terperinci untuk memahami dan menganalisis data empiris. *Middle theory* penelitian ini menggunakan Teori Pembelajaran Dewasa (Andragogy). Teori ini, yang dikembangkan oleh Malcolm Knowles, menekankan bahwa orang dewasa belajar secara berbeda dari anak-anak. Pembelajaran dewasa lebih berpusat pada peserta didik dan berfokus pada pengalaman hidup, kebutuhan praktis, dan orientasi tugas.

Menurut Knowles (dalam Sujarwo, 2017:3): “*Andragogy is therefore, the art and science of helping adults learn* “. Andragogi adalah suatu ilmu dan seni dalam membantu orang dewasa dalam belajar. Dilihat dari segi epistemologi, andragogi berasal dari bahasa Yunani dengan akar kata *Aner* yang artinya orang untuk membedakannya dengan *paid* yang artinya anak. Knowles dalam bukunya *The Modern Practice of Adult Education*, mengatakan bahwa semula ia mendefinisikan andragogi sebagai seni dan ilmu membantu orang dewasa belajar. Kemudian setelah melihat hasil eksperimen banyak pendidik yang menerapkan konsep andragogi pada pendidikan anak-anak dan menemukan bahwa dalam situasi-situasi tertentu memberikan hasil yang lebih baik, Knowles melihat bahwa andragogi sebenarnya merupakan model asumsi yang lain mengenai pembelajaran yang dapat digunakan di samping model asumsi pedagogi. Ia juga mengatakan model-model itu berguna apabila tidak dilihat sebagai dikotomi, tetapi sebagai dua ujung dari suatu spektrum, dimana suatu asumsi yang realistik pada situasi yang berada di antara ujung tersebut (Sujarwo, 2017: 3).

Gap antara teori andragogi yang dikembangkan oleh Malcolm Knowles berdasarkan prinsip-prinsip utama andragogi dan membandingkannya dengan praktik pembelajaran di PKBM Bina Bangsa Berkarakter dan PKBM Cahaya Kahuripan Bangsa sebagai berikut:

1. Kebutuhan untuk Tahu (*Need to Know*), orang dewasa perlu memahami alasan di balik pembelajaran. Kedua PKBM tersebut tidak cukup menjelaskan alasan di balik pembelajaran, sehingga peserta didik akan kurang termotivasi atau tidak sepenuhnya terlibat.
2. Konsep Diri (*Self-Concept*), orang dewasa melihat diri mereka sebagai individu yang mandiri dan bertanggung jawab. Kedua PKBM tersebut terlalu mengontrol proses pembelajaran tanpa melibatkan peserta didik, hal ini mengurangi partisipasi dan kemandirian mereka.
3. Pengalaman Sebagai Sumber Pembelajaran (*Experience*), pengalaman hidup dan pekerjaan sebelumnya menjadi sumber belajar yang penting. Pengalaman peserta didik pada kedua PKBM tersebut tidak diintegrasikan dalam pembelajaran, sehingga potensi belajar dari pengalaman nyata tidak diperoleh.
4. Kesiapan untuk Belajar (*Readiness to Learn*), orang dewasa lebih siap untuk belajar hal-hal yang relevan dengan peran sosial dan profesional mereka. Materi cenderung tidak relevan dengan kebutuhan peserta didik atau disampaikan pada waktu yang tidak tepat, sehingga motivasi dan efektivitas pembelajaran pada kedua PKBM tersebut menurun.
5. Orientasi Pembelajaran (*Orientation to Learning*), pembelajaran orang dewasa berorientasi pada masalah dan penerapan praktis daripada materi teoretis. Pelatihan yang terlalu teoretis tanpa aplikasi praktis, sehingga peserta didik pada kedua PKBM tersebut merasa kesulitan untuk menghubungkan pembelajaran dengan situasi nyata.
6. Motivasi untuk Belajar (*Motivation*), motivasi orang dewasa lebih dipengaruhi oleh faktor internal seperti kepuasan diri dan pengembangan pribadi. Motivasi internal peserta didik pada kedua PKBM tersebut kurang diperhatikan, mereka merasa kurang termotivasi untuk terlibat penuh dalam pelatihan.

Penelitian ini menggunakan teori operasional yang digunakan untuk membingkai penelitian ini adalah teori Pendidikan Nonformal yang menurut Coombs (Sungsri, 2018:22) memberikan definisi bahwa pendidikan nonformal

adalah setiap kegiatan terorganisasi dan sistematis, diluar sistem persekolahan yang mapan, dilakukan secara mandiri atau melayani peserta didik tertentu di dalam mencapai tujuan belajarnya. Kemudian Farrow, Arcos, Pitt & Weller (2015: 51) mengatakan bahwa pembelajaran non-formal adalah aspek yang signifikan dari pengalaman belajar. Belajar sekarang dapat terjadi dalam berbagai cara melalui komunitas praktik, jaringan pribadi, dan melalui penyelesaian tugas-tugas yang berhubungan dengan pekerjaan. Belajar adalah proses berkelanjutan, yang berlangsung seumur hidup.

Gap antara teori pendidikan nonformal menurut Coombs dan kondisi di lapangan pada PKBM Bina Bangsa Berkarakter dan PKBM Cahaya Kahuripan Bangsa sebagai berikut:

1. Kegiatan Terorganisasi dan Sistematis, Pendidikan nonformal harus terorganisasi dan memiliki sistem yang jelas. Kedua PKBM tersebut kekurangan struktur yang jelas atau sistem administrasi yang efektif, sehingga menghambat proses pembelajaran dan pencapaian tujuan pelatihan.
2. Di Luar Sistem Persekolahan, Pendidikan nonformal tidak terikat dengan kurikulum sekolah formal dan lebih fleksibel. Kedua PKBM tersebut masih cenderung mengikuti metode dan struktur pendidikan formal, sehingga kehilangan fleksibilitas yang menjadi kekuatan pendidikan nonformal.
3. Dilakukan Secara Mandiri atau Melayani Peserta Didik Tertentu, Pendidikan nonformal bisa dilakukan oleh individu atau ditujukan untuk kelompok dengan kebutuhan khusus. Kedua PKBM tersebut tidak cukup fleksibel dalam menyesuaikan program dengan kebutuhan individu atau kelompok tertentu, sehingga tidak sepenuhnya memenuhi tujuan belajar peserta didik.
4. Mencapai Tujuan Belajar Spesifik, fokus pendidikan nonformal adalah mencapai tujuan belajar yang relevan dan spesifik. Tujuan belajar pada kedua PKBM tersebut tidak jelas atau tidak relevan dengan kebutuhan peserta didik, sehingga program pelatihan tidak efektif.

Pembelajaran di PKBM yang dilaksanakan dalam pembelaran tanpa batas usia (andradogi), diperlukan peran PKBM dalam pelatihan untuk meningkatkan kewirausahaan Peserta didik. Pelatihan-pelatihan yang bersifat aplikatif yang

diperlukan oleh masyarakat dan lingkungannya sehingga dapat meningkatkan kualitas kehidupan peserta didik.

Peran pendidikan dalam memberdayakan masyarakat, khususnya dalam bidang kewirausahaan, menjadi sangat penting dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan tuntutan kemandirian individu. Pendidikan tidak hanya bertugas mentransfer pengetahuan, tetapi juga harus mampu membentuk keterampilan hidup yang kontekstual, adaptif, dan produktif. Dalam konteks ini, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai lembaga pendidikan nonformal memiliki peran strategis dalam menyelenggarakan pelatihan-pelatihan kewirausahaan bagi peserta didik yang berasal dari berbagai latar belakang, terutama mereka yang tidak terlayani oleh jalur pendidikan formal.

Peran tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pada Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan bahwa *pendidikan nonformal berfungsi sebagai pelengkap, penambah, dan/atau pengganti pendidikan formal dalam menunjang pendidikan sepanjang hayat*. Selanjutnya, ayat (3) menegaskan bahwa *pendidikan nonformal dapat berbentuk kursus, pelatihan, kelompok belajar, PKBM, dan bentuk lain yang sejenis*. Ini memberikan legitimasi kepada PKBM untuk menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan secara legal dan sistematis.

Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, pada Pasal 134 menyebutkan bahwa *pendidikan nonformal diarahkan untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional*. Ini mempertegas bahwa pelatihan kewirausahaan yang berbasis kompetensi sangat relevan diselenggarakan oleh PKBM, mengingat tujuannya yang berorientasi pada pemberdayaan dan kemandirian ekonomi peserta.

Di samping itu, Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal menegaskan bahwa setiap satuan pendidikan nonformal seperti PKBM memiliki kewenangan untuk mengembangkan dan menyelenggarakan program pelatihan keterampilan yang berorientasi pada

kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Pelatihan kewirausahaan adalah salah satu bentuk pelatihan vokasional yang sangat dianjurkan untuk diselenggarakan oleh PKBM demi mendukung pembangunan ekonomi lokal dan nasional.

Namun, dalam praktiknya di lapangan, pelaksanaan pelatihan kewirausahaan di PKBM masih menghadapi berbagai kendala. Mulai dari keterbatasan sumber daya manusia yang profesional, kurangnya fasilitas pelatihan yang memadai, minimnya akses terhadap modal usaha, hingga rendahnya motivasi peserta didik untuk memulai usaha mandiri. Di sinilah pentingnya dilakukan penelitian yang mendalam untuk menganalisis bagaimana peran PKBM dalam pelatihan dapat benar-benar meningkatkan kewirausahaan peserta didik, serta bagaimana manajemen pelatihan tersebut direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, hingga menemukan solusi terhadap kendala.

Peran penting Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam membekali peserta didik dengan jiwa dan keterampilan wirausaha. Di era modern ini, di mana lapangan pekerjaan semakin kompetitif dan peluang usaha terus berkembang, membekali generasi muda dengan mentalitas wirausaha menjadi kunci untuk masa depan yang gemilang. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam membekali peserta didik dengan jiwa dan keterampilan wirausaha. Penelitian ini menjadi sorotan penting di tengah upaya nasional untuk meningkatkan angka wirausaha dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.

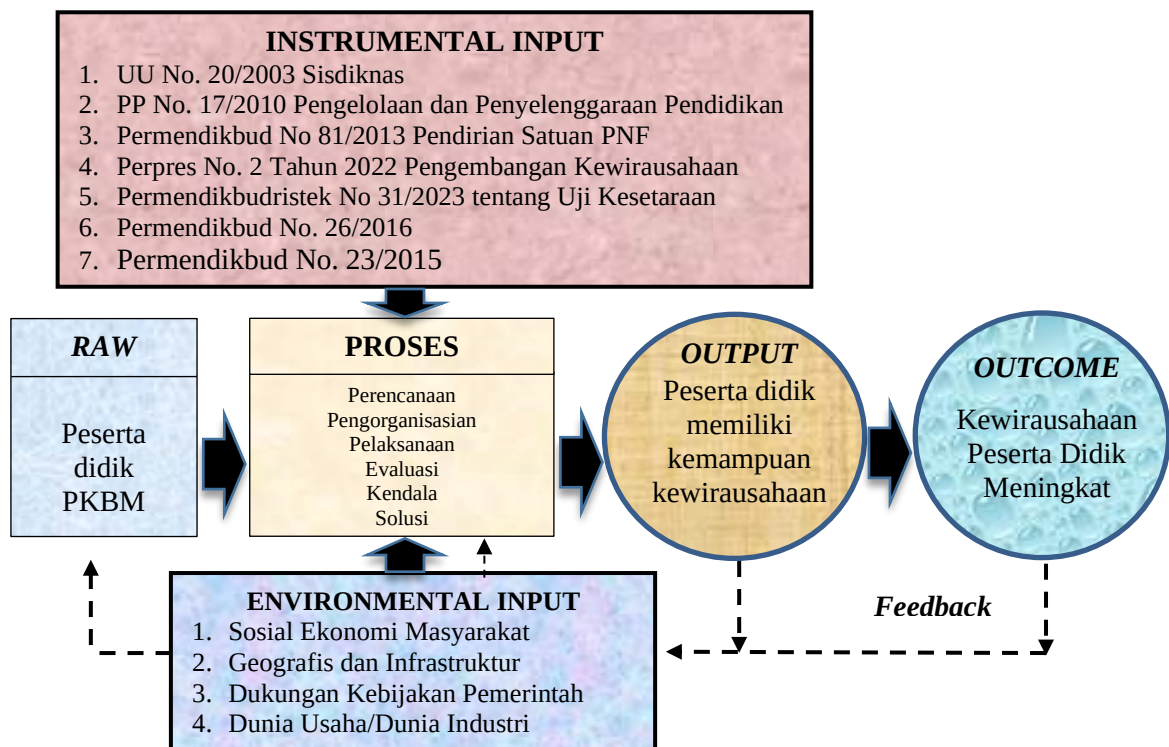
Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dengan judul *Manajemen Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dalam Pelatihan untuk Meningkatkan Kewirausahaan Peserta Didik (Studi Fenomenologi di PKBM Bina Bangsa Berkarakter dan PKBM Cahaya Kahuripan Bangsa)*

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

1. Perumusan Masalah

Akar permasalahan peran PKBM dalam pelatihan untuk meningkatkan kewirausahaan Peserta didik merupakan permasalahan yang terus berkembang baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi.

Permasalahan ini terjadi dikarenakan belum optimalnya pemberdayaan kurikulum, tenaga pendidik, sarana prasarana dan pembiayaan, hal ini diperburuk lagi belum optimalnya keterlibatan keluarga, Masyarakat, pemerintah dan pengguna lulusan; sehingga berakibat terhadap Nilai-nilai kewirausahaan dan sekaligus berdampak terhadap kemandirian peserta didik. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 1.1 Perumusan Masalah

Berdasarkan perumusan masalah, menunjukkan bahwa, *Raw Input*, yaitu Peserta didik PKBM Bina Bangsa Berkarakter dan PKBM Cahaya Kahuripan Bangsa yang menerima pendidikan kewirausahaan; *Proses*, yaitu Manajemen Pendidikan Kewirausahaan pada PKBM meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi, kendala, dan solusi. *Output*, yaitu hasil dari proses Pendidikan Kewirausahaan pada PKBM berupa capaian Standar Kompetensi Lulusan (SKL); *Outcome*, yaitu untuk melahirkan kualitas peserta didik yang mandiri, kreatif, dan orientasi kedepan yang diakui publik. *Instrumental Input*, yaitu Kebijakan Pemerintah, Sumber Daya

Manusia, Sarana dan Prasarana serta Biaya; *Environmental Input*, yaitu Dunia Usaha dan Dunia Industri, Masyarakat dan Pendidikan. Dari uraian di atas, permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan: **“Bagaimana manajemen PKBM dalam pelatihan untuk meningkatkan kewirausahaan Peserta didik”**.

2. Pembatasan Masalah.

Mengingat masalah yang dirumuskan cukup luas, maka penelitian ini membatasi masalah berkaitan dengan peran PKBM dalam pelatihan untuk meningkatkan kewirausahaan Peserta didik, meliputi:

- a. Perencanaan PKBM dalam pelatihan untuk meningkatkan kewirausahaan Peserta didik, meliputi: identifikasi kebutuhan peserta didik, analisis lingkungan, perencanaan program pelatihan, penetapan tujuan, metode pembelajaran, perencanaan materi dan kurikulum.
- b. Pengorganisasian PKBM dalam pelatihan untuk meningkatkan kewirausahaan Peserta didik, meliputi: struktur organisasi PKBM, rekrutmen instruktur dan fasilitator, penjadwalan kelas, kolaborasi dan kemitraan.
- c. Pelaksanaan PKBM dalam pelatihan untuk meningkatkan kewirausahaan Peserta didik, meliputi: orientasi peserta, pelaksanaan sesi pelatihan, pengajaran teori pelatihan, praktik dan proyek, mentoring dan pendampingan
- d. Evaluasi PKBM dalam pelatihan untuk meningkatkan kewirausahaan peserta didik, meliputi: penilaian proses pelatihan, pengukuran hasil dan dampak, evaluasi kualitas pelatihan, analisis data dan pelaporan, feedback dan tindak lanjut.
- e. Kendala PKBM dalam pelatihan untuk meningkatkan kewirausahaan peserta didik, meliputi: sumber daya finansial, sumber daya manusia, fasilitas dan peralatan, komitmen dan motivasi peserta didik, pengembangan materi pelatihan, akses permodalan dan pemasaran.

- f. Solusi untuk mengatasi kendala PKBM dalam pelatihan untuk meningkatkan kewirausahaan peserta didik, meliputi: sumber daya finansial, sumber daya manusia, fasilitas dan peralatan, komitmen dan motivasi peserta didik, pengembangan materi pelatihan, akses permodalan dan pemasaran.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji gambaran umum tentang peran PKBM dalam pelatihan untuk meningkatkan kewirausahaan Peserta didik.

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus ini menganalisis :

- 1) Perencanaan PKBM dalam pelatihan untuk meningkatkan kewirausahaan peserta didik di PKBM Bina Bangsa Berkarakter dan PKBM Cahaya Kahuripan Bangsa.
- 2) Pengorganisasian PKBM dalam pelatihan untuk meningkatkan kewirausahaan peserta didik di PKBM Bina Bangsa Berkarakter dan PKBM Cahaya Kahuripan Bangsa.
- 3) Pelaksanaan PKBM dalam pelatihan untuk meningkatkan kewirausahaan peserta didik di PKBM Bina Bangsa Berkarakter dan PKBM Cahaya Kahuripan Bangsa.
- 4) Evaluasi PKBM dalam pelatihan untuk meningkatkan kewirausahaan peserta didik di PKBM Bina Bangsa Berkarakter dan PKBM Cahaya Kahuripan Bangsa.
- 5) Kendala PKBM dalam pelatihan untuk meningkatkan kewirausahaan peserta didik di PKBM Bina Bangsa Berkarakter dan PKBM Cahaya Kahuripan Bangsa.

- 6) Solusi PKBM dalam pelatihan untuk meningkatkan kewirausahaan peserta didik di PKBM Bina Bangsa Berkarakter dan PKBM Cahaya Kahuripan Bangsa.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoretis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori pendidikan nonformal, khususnya dalam konteks bagaimana PKBM dapat menjadi wadah strategis dalam menumbuhkan jiwa kewirausahaan peserta didik yang tidak terlayani oleh sistem pendidikan formal. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian teori kewirausahaan dengan menyoroti bagaimana pelatihan kewirausahaan dalam konteks pendidikan masyarakat dapat mengintegrasikan nilai-nilai lokal, kebutuhan hidup praktis, serta pendekatan pembelajaran orang dewasa (andragogi).

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Kepala PKBM

Penelitian ini memberikan gambaran praktik manajerial yang efektif dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi program pelatihan kewirausahaan. Kepala PKBM dapat menggunakan hasil ini untuk merancang strategi yang lebih tepat guna dan kontekstual.

2) Bagi Tutor

Penelitian ini memberikan inspirasi dan acuan bagi tutor dalam mengembangkan metode pembelajaran kewirausahaan yang lebih kontekstual, partisipatif, dan berbasis proyek. Selain itu, dapat digunakan untuk memperkuat kapasitas pendampingan dan mentoring.

3) Bagi Peserta Didik PKBM

Penelitian ini mendorong kesadaran peserta didik tentang pentingnya pelatihan kewirausahaan sebagai jalan untuk mencapai kemandirian ekonomi. Mereka juga dapat memperoleh wawasan dan pengalaman konkret dari praktik-praktik pelatihan yang sudah berhasil dijalankan.

4) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi rujukan awal bagi pengembangan model pelatihan kewirausahaan di PKBM, serta membuka ruang bagi kajian lanjutan yang lebih mendalam tentang efektivitas metode pelatihan, peran kemitraan, atau pengaruh teknologi dalam pendidikan non formal.

D. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan dalam penelitian ini adalah;

1. Bagaimana perencanaan PKBM dalam pelatihan untuk meningkatkan kewirausahaan peserta didik di PKBM Bina Bangsa Berkarakter dan PKBM Cahaya Kahuripan Bangsa?
2. Bagaimana pengorganisasian PKBM dalam pelatihan untuk meningkatkan kewirausahaan peserta didik di PKBM Bina Bangsa Berkarakter dan PKBM Cahaya Kahuripan Bangsa?
3. Bagaimana pelaksanaan PKBM dalam pelatihan untuk meningkatkan kewirausahaan peserta didik di PKBM Bina Bangsa Berkarakter dan PKBM Cahaya Kahuripan Bangsa di PKBM Bina Bangsa Berkarakter dan PKBM Cahaya Kahuripan Bangsa?
4. Bagaimana Evaluasi PKBM dalam pelatihan untuk meningkatkan kewirausahaan peserta didik di PKBM Bina Bangsa Berkarakter dan PKBM Cahaya Kahuripan Bangsa?
5. Apa kendala PKBM dalam pelatihan untuk meningkatkan kewirausahaan peserta didik di PKBM Bina Bangsa Berkarakter dan PKBM Cahaya Kahuripan Bangsa?
6. Bagaimana solusi program peran PKBM dalam pelatihan untuk meningkatkan kewirausahaan peserta didik di PKBM Bina Bangsa Berkarakter dan PKBM Cahaya Kahuripan Bangsa?